Seri Kebanksentralan

No. 1

UANG

Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian

Solikin

Suseno

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)

BANK INDONESIA

Seri Kebanksentralan Bank Indonesia

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan, oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.

Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
BANK INDONESIA
Jl. MH. Thamrin No.2, Gd. Tipikal lt.2, Jakarta 10010
No. Telepon: 021-3817628, No. Fax : 021 – 3501912
e-mail: PPSK@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan - Bank Indonesia

Solikin

Uang : Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian / Solikin, Suseno. -- Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.

58 hlm. ; 15,2 cm x 22,8 cm. -- (Seri Kebanksentralan ; 1)

Bibliografi : hlm. 54

ISBN 979-3363-00-2

Sambutan

Sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan iklim keterbukaan. Selain itu, sebagai sumbangsih Bank Indonesia untuk berperan dalam kegiatan peningkatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, dalam dua tahun terakhir ini Bank Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan penelitian yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan. Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, menerbitkan buku seri kebanksentralan.

Lingkup materi yang dibahas dalam buku seri kebanksentralan ini sangatlah luas, meliputi disiplin ilmu ekonomi makro-moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab bank sentral. Untuk tahun penerbitan perdana ini, kami menerbitkan empat seri buku sekaligus, terdiri dari: (i) Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (ii) Penyusunan Statistik Uang Beredar, (iii) Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, dan (iv) Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan. Kami berupaya untuk dapat menuangkan bahasan pada masing-masing topik tersebut dengan bahasa yang cukup sederhana dengan menghindari sejauh mungkin penggunaan istilah-istilah teknis yang dapat mempersulit pemahamannya. Kalaupun masih terdapat istilah-istilah teknis yang sulit disederhanakan, kami berusaha tetap menyertakan istilah aslinya.

Mengiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Desember 2002

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Halim Alamsyah

Direktur

Pengantar

Uang beredar merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perumusan kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, uang beredar senantiasa menjadi perhatian, baik oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi moneter, para pengamat ekonomi, maupun masyarakat pada umumnya. Namun, uang beredar masih merupakan istilah yang relatif belum banyak dipahami atau dimengerti oleh masyarakat luas. Seri kebanksentralan no. 1 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas yang berminat memahami berbagai hal yang terkait dengan masalah-masalah moneter di Indonesia, khususnya uang beredar dan hal-hal yang terkait dengannya.

Banyak rekan yang telah memberikan kontribusi berharga dalam rangka penyusunan buku ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, dan Direktorat Statistik Moneter yang telah membantu kelancaran penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Sdr. Halim Alamsyah, Sdr. Iskandar, Sdri. Susmiyati, Sdr. M. Anwar Bashori, Sdr. Nunu Hendrawanto, Sdr. Erwin Haryono atas partisipasinya dalam diskusi dan pemberian saran dalam penyelesaian tulisan ini. Demikian juga kepada Sdr. P. Iman Soesanto dari Direktorat Pemeriksaan Bank 1 dan Tubagus Feridhanusetyawan dari CSIS atas masukannya pada tahap akhir penulisan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai semua kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini. Akhirnya, mudah-mudahan karya sederhana ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Desember 2002

Penulis

Daftar Isi

Uang:
Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian

Uang

Apa itu Uang ?

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Dengan kondisi tersebut, memang tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas, dan tepat. Namun, anehnya, dalam masyarakat moderen saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang. Besar/kecil, tua/muda, dan kaya/miskin sejak bangun tidur sampai kembali tidur, semuanya tidak dapat melepaskan diri dari benda yang satu ini: uang.

Apa sebenarnya benda yang disebut uang itu? Secara sekilas, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diberikan dengan mudah; orang awam akan dapat menunjukkan uang pecahan kertas atau logam yang berlaku yang dipegangnya sebagai uang. Namun, apakah mereka juga mempunyai anggapan yang sama terhadap uang pecahan kertas atau logam dari daerah atau negara lain? Mungkin saja tidak. Mereka mungkin lebih yakin atau senang untuk memegang uang yang barasal dari daerahnya sendiri dibandingkan dengan uang yang berasal dari daerah lain. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah: mengapa orang tersebut lebih memilih benda seperti kertas dan logam di atas sebagai uang, bukan benda lainnya, misalnya kulit binatang atau lempengan besi?

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa ternyata sangatlah sulit atau hampir mustahil untuk mendefinisikan uang baik menurut bentuk fisik maupun ciri-cirinya karena bentuk fisik dan ciri-ciri uang begitu bervariasi, tergantung pada waktu dan tempat penggunaannya. Dengan

demikian, untuk mempermudah dan menyederhanakan pemahamannya, uang dilihat sebagaimana uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dilihat dari kegunaan atau fungsinya bagi manusia. Dengan kata lain, uang dipahami dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan uang tersebut.

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*). Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.[1] Di bawah ini akan diuraikan secara singkat keempat fungsi dasar uang yang telah disampaikan di atas.

Uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam – karena ia mempunyai ayam yang

---

[1]Dalam buku-buku teks ekonomi-moneter tradisional, dua fungsi pertama, yaitu uang sebagai alat tukar dan satuan hitung dianggap sebagai fungsi asli uang, sementara fungsi-fungsi lainnya dianggap sebagai fungsi turunan uang. Sementara itu, Glyn Davies dalam bukunya, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (2002), mendefinisikan fungsi uang dengan lebih detail lagi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus meliputi keempat fungsi di atas ditambah fungsi lainnya, yaitu sebagai alat pembayaran (*means of exchange*) dan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*). Adapun fungsi umum meliputi fungsi-fungsi uang sebagai: (i) aset likuid (*liquid asset*), (ii) faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), (iii) faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan (iv) faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*). Tentunya, tidak semua benda yang dapat digunakan sebagai uang dapat menjalankan semua fungsi tersebut. Dalam hal ini, fungsi benda tertentu yang dapat digunakan sebagai uang mungkin dapat berubah, sejalan dengan perkembangan zaman.

banyak dan sangat membutuhkan garam – harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi.[2] Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah mahluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

Uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.

Sekilas Perkembangan Penggunaan Uang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, uang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang peradaban manusia. Pada awalnya, masyarakat primitif yang

[2] Uraian lebih lanjut mengenai pola pertukaran barang tersebut akan disampaikan pada bagian berikutnya, tentang perkembangan penggunaan uang.

hidup berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*) belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang (misalnya sebagai alat penukar). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antarindividu atau antarkelompok masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, pertukaran atau transaksi antarindividu atau antarkelompok masyarakat tersebut pada awalnya dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah sistem barter.[3] Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda (*double coincidence*). Apa yang dimaksud dengan kebetulan ganda? Kebetulan yang pertama adalah bahwa seseorang bertemu dengan orang lain yang akan menukarkan barangnya dan kebetulan yang kedua adalah bahwa barang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan. Sebagaimana yang telah dicontohkan sebelumnya, dalam pola pertukaran antara ayam dan garam antarindividu, kondisi yang harus dipenuhi adalah: orang yang memiliki ayam dan berniat ingin menukarkannya dengan garam harus mencari orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Dengan demikian, dalam sistem barter, semua barang harus dapat diukur dengan seluruh atau sebagian barang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kebetulan ganda tersebut akan semakin sulit ditemukan. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbulah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antarindividu dan antarkelompok masyarakat.

Penggunaan benda-benda sebagai alat penukar (yang selanjutnya disebut sebagai uang) semula hanya didasarkan pada kesepakatan di antara

---

[3] Perlu dicatat bahwa sebenarnya barter kadang-kadang juga dilakukan pada zaman moderen ini, misalnya Indonesia pernah melakukan barter dengan Pemerintah Thailand, yaitu dengan menukarkan pesawat terbang yang diproduksi P.T. Nurtanio dengan sejumlah beras ketan. Benda-benda tertentu (misalnya rokok dan kain) juga dipergunakan sebagai alat pembayaran pada saat uang sangat langka (misalnya dalam penjara, kamp pengungsi, atau keadaan perang).

masyarakat yang mempergunakan. Suatu benda hanya dapat dipergunakan sebagai alat tukar setelah disepakati secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan, yakni, hampir setiap orang harus mau menerima benda tersebut untuk membayar barang-barang yang diperdagangkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya.[4] Benda yang dipergunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dalam sistem perekonomian yang sangat sederhana tersebut pada umumnya adalah benda yang dianggap berharga dan seringkali juga yang mempunyai kegunaan untuk dikonsumsi atau keperluan produksi. Benda yang di-pergunakan sebagai uang tersebut pada umumnya juga mudah dibawa dan tidak mudah rusak atau tahan lama.

Di berbagai tempat atau kelompok masyarakat benda yang dipergunakan sebagai alat penukar tersebut berbeda-beda dan sangat bervariasi. Sebagai-mana telah disinggung sebelumnya, pada awalnya benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal sebagai uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu negara. Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, semakin meluas. Untuk mem-perlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang.

Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakannya kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat diperguna-kan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak.

[4] Glyn Davies (2002).

Berkaitan dengan penggunaan logam sebagai uang, telah dikenal uang logam emas dan perak sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang-surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan/atau mahalnya biaya penambangan logam tersebut.[5] Dalam perkembangan selanjutnya, selain kedua logam tersebut, tembaga juga sangat diminati mengingat logam tersebut lebih mudah didapat sehingga lebih murah harganya. Keberadaan beberapa uang logam tersebut secara bersamaan di tengah masyarakat menimbulkan konsekuensi logis, yaitu semakin diminatinya uang dengan kualitas rendah (tembaga) dibandingkan dengan uang dengan kualitas baik (emas dan perak). Apabila terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan hilangnya uang dengan kualitas baik dari peredaran.[6]

Dalam perkembangannya, penggunaan logam-logam berharga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain oleh adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, risiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga-lembaga swasta atau pemerintah mulai menyimpan sertifikat-sertifikat berharga yang mewakili logam tersebut. Pada awal penggunaannya, sertifikat tersebut didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan di tempat penyimpanan atau yang dikenal sebagai bank.[7] Setelah beberapa waktu digunakan dan diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak bergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh, misalnya hanya didukung 40%

---

[5] Penerapan standar barang yang sangat terkenal dan berlaku cukup lama (berlaku hampir satu abad di Inggris) adalah standar emas. Ronald I. McKinnon. "*The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective*", Journal of Economic Literature, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

[6] Dalam istilah ilmu ekonomi moneter terdapat pernyataan yang dikenal sebagai hukum Gresham yang berbunyi : "*bad money tends to drive out good money out of circulation*".

[7] Cikal bakal sistem perbankan sudah dikenal sebelum digunakannya pecahan logam sebagai uang. Perkembangan awal "perbankan" tersebut dimulai di masyarakat Mesopotamia kuno. Pada saat itu istana dan kuil banyak digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengamankan gandum dan komoditas lainnya. Bukti penyimpanan yang diterbitkan dapat digunakan untuk membayar upeti kepada penguasa dan transaksi lain, seperti pembayaran utang dan pajak. Setelah dikenalkannnya pecahan logam sebagai uang, fungsi "bank gandum" tersebut berevolusi sebagai tempat untuk menyimpan uang. Sementara itu, sistem perbankan dengan bentuk seperti yang dikenal saat ini mulai berkembang sejak abad ke-18 di Inggris. Glyn Davies (2002).

oleh simpanan emas. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan (*nilai nominal*) tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan (*nilai intrinsik*). Apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, uang tersebut dikenal dengan *uang fiat*. Dalam hal ini uang diakui sebagai tanda setuju. Termasuk di antara *uang fiat* adalah uang kertas yang kita kenal selama ini.[8]

Sejarah juga mencatat bahwa penjaminan uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga, seperti emas di bank negara, mengalami pasang surut, sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia I. Baru kemudian sesaat setelah Perang Dunia II, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (dollar Amerika) dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan *Bretton Woods*. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan *Bretton Woods* akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas.

---

[8] Penggunaan uang kertas sebagai tanda setuju sebenarnya mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Pertama kali uang kertas digunakan sebagai pengganti sementara dari tembaga (awal abad ke-9 di Cina). Masyarakat Barat mulai ikut mencetak uang kertas pada abad ke-17, yang kemudian diikuti pula oleh masyarakat Timur hingga saat ini. Glyn Davies (2002).

Robert Temple dalam bukunya *The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention* (1986) menyebutkan bahwa uang kertas tersebut pada awalnya dinamai "uang terbang" (*flying money*) karena begitu ringan sehingga dapat terbang apabila tertiup angin.

Contoh *uang fiat* di Indonesia adalah uang kertas pecahan Rp100.000,00. Dalam hal ini, *nilai nominal* uang kertas tersebut adalah Rp100.000,00, sementara *nilai intrinsik* yang meliputi harga kertas dan biaya cetak untuk membuat selembar uang Rp100.000,00 tersebut tentu jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Dalam kondisi tertentu, karena begitu rendah nilai intrinsiknya, beberapa ahli juga menganggap uang fiat kertas sebagai uang "hampa". Contoh sederhana: seandainya seseorang menyimpan satu peti uang kertas pecahan seratus ribuan dan, karena sesuatu hal Pemerintah menetapkan aturan bahwa nilai uang seratus ribu menjadi seribu, maka secara otomatis nilai semua uang tersebut berkurang secara drastis, menjadi seperseratus dari nilai semula. Belum lagi, seandainya Pemerintah menyatakan uang tersebut tidak berlaku lagi, maka uang satu peti yang semula bernilai ratusan juta tersebut menjadi tidak bernilai lagi. Kalau pun dijual kiloan di pasar barang bekas, paling-paling uang tersebut cuma dihargai dengan harga yang sangat rendah.

Dengan tidak berlakunya standar emas tersebut, sampai saat ini masyarakat dunia memasuki era yang pengelolaan uangnya bergantung sepenuhnya kepada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara da-lam mengelola perekonomian masing-masing. Dalam standar ini, setiap negara berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Penggunaan uang yang telah diuraikan di atas pada dasarnya terbatas pada lingkup pengertian uang dalam bentuk fisiknya, yaitu uang tunai yang berupa kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Bagaimana dengan penggunaan uang tidak tunai? Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan moderen. Sejalan dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses *giralisasi*, yaitu penyim-panan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik *warkat perintah penarikan* maupun cek untuk melakukan transaksi. Dalam perkembangannya, simpanan giro begitu populer sehingga jumlahnya melebihi jumlah uang kertas dan logam yang digunakan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan tersebut, simpanan tabungan (*savings deposit*) juga mulai dikenal. Bahkan, pada tahun 1950-an, perubahan praktik perbankan telah mendorong semakin besarnya jumlah simpanan tabungan dibandingkan dengan simpanan giro.[9]

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan "uang eloktronis" (*electronic money* atau *E-money*), seperti *internet banking, debit cards*, dan *automatic teller machine* (ATM) *cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. "Uang elektronis" juga muncul

---
[9] Pada perkembangannya, proses *giralisasi* ini mempengaruhi perkembangan pengertian (definisi) uang beredar. Jagdish Handa, *Monetary Economics*, London: ECAP 4EE, 2002. Pembahasan mengenai pengertian uang beredar akan dipaparkan pada bab berikutnya.

dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan "mengisi" *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehen-daki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi. [10]

Otorita Penciptaan Uang

Dalam sejarah awal penggunaan uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara tersirat terlihat bahwa penguasa daerah atau negara yang bersangkutanlah yang mempunyai wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang.[11] Salah satu contohnya adalah penciptaan uang kertas pertama kali pada awal abad ke-9 yang dilakukan oleh kaisar Cina.

Dalam perekonomian moderen, dalam suatu pemerintahan yang struktur kelembagaannya sudah tertata dengan baik, penguasa negara menetap-kan lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan utama dalam penciptaan uang, yang meliputi kegiatan pengeluaran dan pengedaran uang. Mengapa demikian? Hal ini terjadi tidak lain karena keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara yang bersangkutan. Sangatlah wajar apabila ditetapkan lembaga yang atas nama negara atau pemerintahan yang berwenang untuk menciptakan uang. Pada umumnya, lembaga ini dikenal sebagai otoritas moneter atau bank sentral. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya suatu pemerintahan, terutama dengan semakin meningkatnya kegiatan pereko-nomian suatu negara, keberadaan lembaga yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang tersebut semakin dibutuhkan.

Hampir setiap negara di dunia mempunyai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter, yang salah satunya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang.[12] Di Indonesia fungsi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia.[13] Fungsi otoritas moneter di berbagai negara pada umumnya juga dilaksanakan

[10] Pengisian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui transfer bank, mesin ATM, atau pembelian secara tunai

[11] Sampai dengan pembahasan pada bagian ini, yang dimaksud dengan uang adalah jenis uang dalam bentuk fisik yang umum yang kita kenal, yaitu uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat.

oleh bank sentral negara yang bersangkutan, misalnya di Malaysia dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, di Thailand oleh Bank of Thailand, dan di Inggris oleh Bank of England.[14] Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa saat ini di beberapa negara lembaga selain bank sentral juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan fungsi otoritas moneter. Di Amerika Serikat, selain bank sentral (*the Federal Reserve*), Departemen Keuangan (*Treasury Department*) juga mempunyai wewenang untuk menciptakan uang dengan pecahan logam tertentu.[15]

Uang Beredar

Pengertian Uang Beredar

Setelah memahami seluk-beluk uang secara fisik dan perkembangannya secara umum, selanjutnya akan dibahas pengertian uang secara lebih khusus, yaitu uang beredar. Uang beredar adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam ilmu ekonomi moneter. Membaca istilah tersebut mungkin akan timbul pertanyaan: Apa itu uang beredar? Apakah ada uang yang tidak beredar? Apakah uang beredar sama dengan uang tunai? Banyak pertanyaan yang dapat timbul dari istilah tersebut. Untuk itu, secara bertahap akan diuraikan konsep tentang uang beredar tersebut.

Sebelum sampai pada pengertian atau konsep uang beredar perlu dipahami terlebih dahulu penggunaan uang dalam praktik kehidupan

[12] Uang yang diciptakan oleh bank sentral dikenal sebagai uang primer, yang akan dibahas lebih detail pada bab ke-3. Berdasarkan penjelasan dalam buletin *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi-fungsi: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank, dan (4) memegang kas Pemerintah.

[13] Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum berlakunya Undang Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Departemen Keuangan Republik Indonesia juga mengeluarkan dan mengedarkan uang sehingga pada periode tersebut Departemen Keuangan juga termasuk sebagai otoritas moneter.

[14] Masing-masing otoritas moneter di berbagai negara tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tidak sama.

[15] Hubbard, R. Glenn. *Money, the Financial System, and the Economy*, 3rd ed. Addison-Wesley , 2002.

sehari-hari. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai ***uang kartal***. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter.

Apakah pembayaran tunai hanya dapat dilakukan dengan membayar dengan uang tunai? Tentu saja tidak. Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (*demand deposits*). Reke-ning giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah kalau akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selembar cek. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum terse-but sering disebut sebagai ***uang giral***.[16] Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa bank umum adalah sebagai lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang, yaitu yang namanya uang giral. Oleh sebab itu, bank umum juga dikenal sebagai bank umum pencipta uang giral (BPUG).[17]

---

[16] Dalam praktik, selain cek, dalam bertransaksi masyarakat dapat menggunakan bilyet giro (BG) melalui pemindahbukuan dana dari rekening giro ke rekening lainnya. Namun, walaupun digolongkan juga sebagai komponen uang giral, menurut ketentuan yang berlaku BG tidak dianggap sebagai alat pembayaran tunai seperti halnya cek.

[17] Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank perkreditan rakyat (BPR) termasuk dalam pengertian bank. Namun, karena BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro maka BPR tidak dapat digolongkan sebagai bank umum (BPUG).

Dengan uang kartal dan uang giral masyarakat dapat melakukan pembayaran tunai secara langsung. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan simpanan uang tunai dalam bentuk tabungan (*savings deposits*) dan/atau deposito berjangka (*time deposits*) di bank? Sebagaimana diketahui, penarikan simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Lazimnya, penarikan rekening tabungan dan deposito berjangka adalah sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara penabung dengan bank, misalnya dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan.[18] Karena penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, pemilik rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut untuk sementara tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung karena harus menunggu sampai rekening tabungan atau deposito berjangka tersebut jatuh tempo.[19] Uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut disebut sebagai ***uang kuasi***.

Dari ketiga jenis uang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat dua perbedaan pokok. Yang pertama, apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan bank sentral, sementara uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum. Perbedaan yang kedua, apabila dilihat dari penggunaanya, uang kartal dan uang giral dapat dipergunakan langsung sebagai alat pembayaran sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, uang kartal dan uang giral lebih likuid dibandingkan dengan uang kuasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa otoritas moneter (bank sentral) dan bank umum adalah lembaga yang dapat menciptakan uang. Bank sentral mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sedangkan bank umum mengeluarkan dan mengedarkan uang giral serta uang kuasi. Kedua lembaga ini disebut sebagai lembaga yang termasuk dalam ***sistem moneter***. Disebut demikian karena kedua lembaga

---

[18] Yang dimaksud dengan tabungan di sini adalah tabungan berjangka. Dalam perkembangannya, pada saat ini terdapat banyak skim tabungan yang memungkinkan penarikan tabungan tersebut sewaktu-waktu, antara lain dengan menggunakan kartu ATM. Di Indonesia jenis tabungan ini masih digolongkan sebagai uang kuasi.

[19] Selain itu, berbeda dengan penarikan rekening giro yang menggunakan cek, penarikan tabungan dan deposito berjangka pada umumnya menggunakan slip penarikan umum (kuitansi) yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

tersebut mempunyai fungsi moneter, yaitu antara lain dapat menciptakan uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Semua uang yang dikeluarkan dan diedarkan merupakan kewajiban lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkannya. Sebagai contoh, sebuah bank mempunyai kewajiban uang giral sebesar rekening giro yang disimpan masyarakat, ditambah dengan kewajiban uang kuasi sebesar tabungan dan deposito berjangka yang disimpan masyarakat di bank yang bersangkutan.

Dengan mengeluarkan dan mengedarkan uang berarti sistem moneter mempunyai kewajiban kepada ***sektor swasta domestik*** atau **penduduk/ masyarakat** yang terdiri dari individu, badan usaha, dan lembaga lainnya.[20] Berdasarkan pengertian tersebut, uang beredar didefinisikan sebagai ***kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik***.

Jenis-jenis Uang Beredar

Dalam praktik, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan ber-dasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas. Uang kartal atau uang tunai seperti yang telah diuraikan di atas sebenarnya merupakan jenis uang beredar dalam pengertian yang paling sempit.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Di Indonesia saat ini kita hanya mengenal dua macam uang beredar saja, yaitu:[21]

---

[20] *Sektor swasta domestik* lebih merupakan istilah teknis. Untuk mempermudah pemahaman praktis, istilah *masyarakat* juga digunakan pada beberapa penyampaian ulasan dalam buku ini.

[21] Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.*

- ***Uang beredar dalam arti sempit***, yang sering diberi simbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D).
- ***Uang beredar dalam arti luas***, yang sering juga disebut sebagai ***likuiditas perekonomian*** dan diberi simbol M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T). Dengan kata lain M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi (T).

Sementara itu, definisi uang beredar di berbagai negara dapat bervariasi sesuai dengan kondisi sektor keuangan dan perbankan serta kebutuhan otoritas moneter negara yang bersangkutan. Di Amerika Serikat misalnya, definisi uang beredar tidak hanya mengenal istilah M1 dan M2 saja, namun juga M3. Sebagai ilustrasi, perkembangan uang beredar di Indonesia dalam dua dekade terakhir dapat dilihat grafik di bawah ini.

Grafik 1.
Perkembangan M1 dan Komponennya
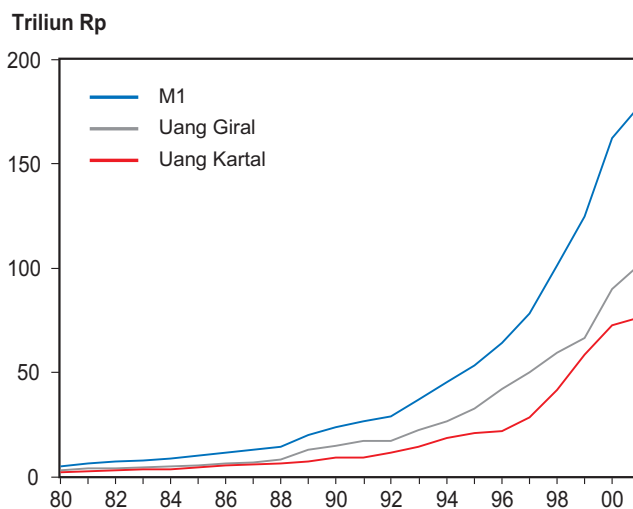
Grafik 2.
Perkembangan M2 dan Komponennya
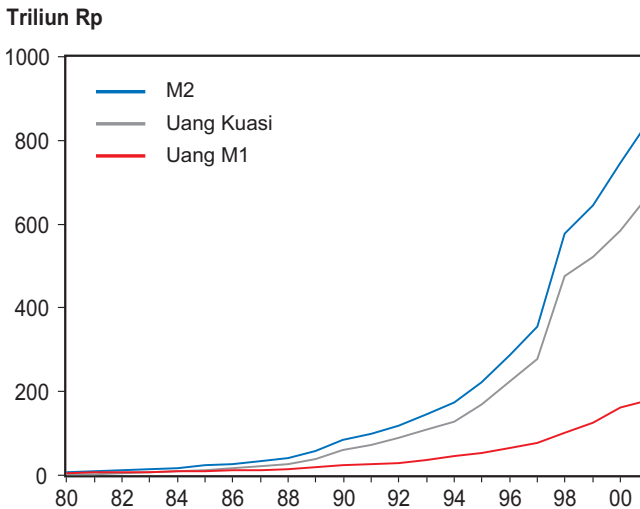
Perkembangan Pengertian Uang Beredar

Pada awal tulisan ini telah dikemukakan berbagai kesulitan dalam mendefinisikan uang, terutama apabila sudah dikaitkan dengan pengertian uang beredar karena pengertian uang telah mengalami evolusi dalam waktu yang sangat panjang. Pada awalnya, dalam sistem perekonomian yang sederhana, yang dimaksud dengan uang adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh penguasa (otoritas moneter) pada waktu tersebut dan merupakan uang kartal saja.

Pada pertengahan abad ke-19, pada saat bank bank umum komersial baru pada tahap awal perkembangannya, simpanan dalam bentuk rekening giro (uang giral) masih baru dan hanya dikenal oleh orang-orang kaya atau pedagang saja; masyarakat luas belum mengenal dan menggunakan-nya. Pada waktu tersebut timbul perdebatan apakah simpanan dalam bentuk giro yang sebenarnya merupakan substitusi uang tunai tersebut dapat dikategorikan sebagai uang. Pada waktu itu disepakati bahwa uang simpanan di bank tersebut tidak dapat dianggap sebagai uang.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan bank umum pada pertengahan pertama abad ke-20, terutama di Amerika, Inggris, dan Kanada, yang diikuti oleh berkembangnya kegiatan ekonomi, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa-jasa bank umum. Pada waktu itu simpanan dalam bentuk giro (demand deposit) yang merupakan substitusi dari uang tunai, sebagaimana uang giral pada saat ini, mulai diakui sebagai uang beredar. Sejak saat itu mulai dikenal apa yang sekarang merupakan konsep uang beredar dalam arti sempit, yang diberi simbol M1. Pada awal tahun 1960 mulai dikenal konsep uang beredar dalam arti luas atau yang dikenal sebagai M2, yaitu dengan menambahkan uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka di bank terhadap definisi uang dalam arti sempit (M1). [22]

Salah satu isyu yang juga terjadi dalam perekonomian Indonesia adalah mengenai keberadaan simpanan tabungan (*savings deposits*) dalam M2, padahal, sebagaimana diketahui, kebanyakan tabungan yang ditawarkan oleh perbankan dewasa ini adalah jenis tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Ditambah dengan kemudahan pelayanan melalui penggunaan kartu ATM, sifat simpanan tabungan dinilai sama dengan simpanan giral, bahkan hampir sama dengan uang tunai. Dengan demikian, simpanan tabungan jenis tersebut seharusnya digolongkan ke dalam jenis uang M1, bukan M2.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian uang beredar telah berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di sektor keuangan dan perbankan. Seperti yang telah diketahui, menjelang akhir abad ke-20 sektor keuangan dan perbankan telah berkembang sangat pesat. Keadaan tersebut terutama juga ditunjang oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan tersebut, telah berkembang produk-produk baru di bidang keuangan dan perbankan, seperti *credit cards*, *debit cards*, dan *internet banking*. Dengan perkembangan tersebut, pengertian uang beredar tentunya juga akan mengalami perubahan. Hal ini tentunya dimaksudkan secara tidak langsung untuk menampung keragaman transaksi keuangan masyarakat. Seperti telah dicontohkan sebelumnya, Bank Sentral Amerika Serikat dalam mengitung jumlah uang beredar tidak hanya menggunakan

[22] Jagdish Handa (2002).

jenis pengelompokan M1 dan M2 saja, namun juga M3. Inggris menggunakan jenis pengelompokan M1, M2, dan M4. Sementara itu, Kanada menggunakan jenis pengelompokan yang lebih rinci lagi, yaitu M1, M2, M2+, *adjusted* M2+, dan M3.[23]

Mekanisme Penciptaan Uang

Dalam bab satu telah dibahas pengertian uang menurut fungsinya, perkembangan penggunaan uang, dan otoritas yang mempunyai wewenang untuk megeluarkan serta mengedarkan uang. Adapun dalam bab dua telah dibahas pula pengertian uang beredar, jenis-jenis uang beredar, dan perkembangan pengertian uang beredar dari waktu ke waktu. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana uang beredar itu diciptakan.

Untuk menjelaskan hal tersebut, perlu duraikan terlebih dahulu siapa saja pelaku dalam proses penciptaan uang. Berdasarkan pengelompokan peranannya, secara umum dikenal tiga pelaku utama, yaitu (i) otoritas moneter, (ii) bank umum, dan (iii) masyarakat atau sektor swasta domestik. Pada dasarnya, ketiga pelaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan (penawaran) uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan (permintaan) masyarakat akan uang tersebut. Secara sederhana dapat diuraikan: otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasi, sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

Penciptaan Uang Primer oleh Otoritas Moneter

Sebelum dikenal konsep otoritas moneter, hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang ada pada penguasa; dalam hal ini misalnya raja (atau kerajaan). Sejalan dengan berkembangnya sistem ekonomi dan dikenalnya sistem perbankan, konsep otoritas moneter atau bank sentral

[23] Jagdish Handa (2000)

juga mulai dikenal. Pada tahap ini hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab dua, sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktik, ternyata bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai ***uang primer*** atau ***uang inti*** karena jenis uang ini merupakan inti atau “biang” dalam proses penciptaan uang beredar yang sudah dikenal dari uraian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.

Di Indonesia uang primer didefinisikan sebagai ***kewajiban otoritas moneter (Bank Indonesia) terhadap sektor swasta domestik dan bank umum***, yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Ilustrasi mengenai perkembangan uang primer dan uang beredar di Indonesia dalam dua dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.
Perkembangan Uang Primer dan Uang Beredar

Triliun Rp

M2
M1
M0
1000
800
600
400
200
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00
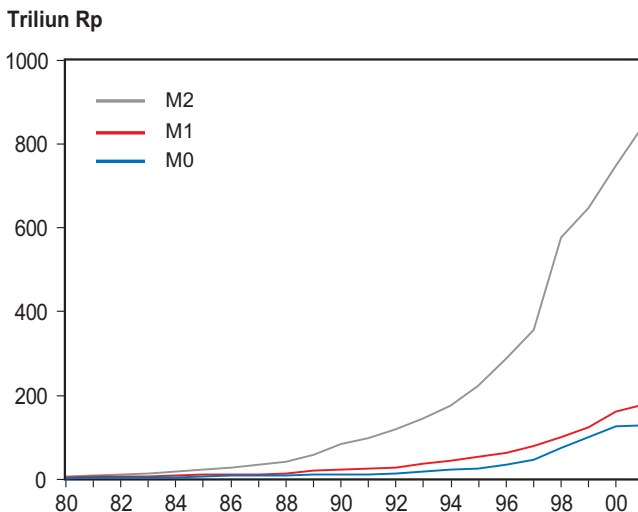
Sumber : Bank Indonesia

Untuk mempermudah pengertian uang primer, dapat diberikan contoh sebagai berikut.

> Seorang eksportir Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk wesel ekspor sebesar $1 juta dengan kurs Rp5.000,00/dolar. Kemudian si eksportir menjual wesel ekspor tersebut ke Bank A. Terhadap penjualan ini, si eksportir melepaskan haknya atas uang $1 juta tersebut dan sebagai gantinya Bank A akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening si eksportir di Bank A. Apabila si eksportir tidak bermaksud menarik tunai simpanan gironya maka yang terjadi selanjutnya adalah Bank A menjual wesel ekspor tersebut ke Bank Indonesia. Terhadap penjualan ini, Bank A melepaskan haknya atas uang $1 juta tersebut dan sebagai gantinya Bank Indonesia akan membukukan sejumlah Rp5 miliar sebagai tambahan pada saldo rekening giro Bank A pada Bank Indonesia. Dengan penambahan pada saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia tersebut pada dasarnya telah tercipta uang primer sebesar Rp5 miliar.

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa apakah si eksportir berniat atau tidak untuk menguangkan ceknya tidak mengubah kenyataan bahwa uang primer sebesar Rp5 miliar telah tercipta. Bentuk uang primer tersebut dapat berupa saldo rekening giro Bank A di Bank Indonesia atau dapat pula berupa uang tunai yang diterima si eksportir.

Berdasarkan contoh di atas, uang primer di Indonesia dapat didefinisikan sebagai:

(i) uang tunai (uang kartal) yang dipegang baik oleh masyarakat maupun bank umum, ditambah dengan

(ii) saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia.[24]

Dalam praktik uang primer tersebut diberi simbol M0. Perlu diketahui bahwa semua uang tunai yang dicetak oleh otoritas moneter adalah uang

---

[24] Berbeda dengan konsep yang dianut oleh beberapa negara lain, cakupan saldo giro yang diperhitungkan sebagai uang primer di Indonesia adalah saldo giro dalam rupiah saja. Hal ini mengingat saldo giro dalam valuta asing tidak digunakan untuk keperluan transaksi namun hanya sebagai pemenuhan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam perkembangannya, pada beberapa kurun waktu neraca otoritas moneter juga menampung saldo rekening giro rupiah milik masyarakat

primer, tidak peduli apakah dipegang oleh masyarakat atau disimpan di bank-bank umum. Dengan demikian, uang kartal adalah uang primer tetapi tidak semua uang primer adalah uang kartal.

Hubungan antara komponen-komponen M0, M1, dan M2 dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini.

Diagram 1. Hubungan M0, M1, dan M2
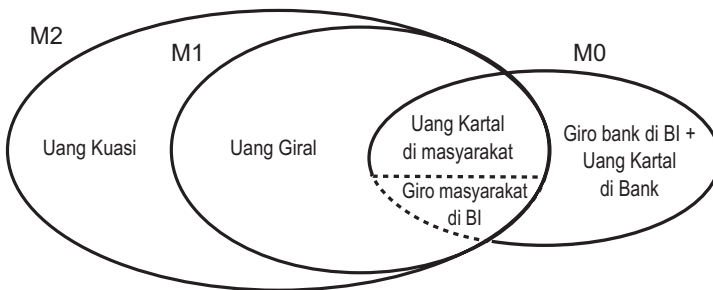
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Uang Primer

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer perlu diketahui terlebih dahulu Neraca Otoritas Moneter. Di Indonesia, neraca tersebut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut.[25]

Neraca Otoritas Moneter

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Luar Negeri Bersih	(ALNB)	Uang kartal	
Aktiva Dalam Negeri Bersih	(ADNB)	- di masyarakat	(C)
- Tagihan bersih pada pemerintah pusat		- di bank umum	
- Tagihan pada sektor swasta domestik		Saldo giro	(R)
- Tagihan pada bank umum		- milik bank umum	
- Aktiva Lainnya Bersih		- milik masyarakat	
	M0		M0

[25] Penjelasan detail mengenai penyusunan Neraca Otoritas Moneter akan disampaikan dalam buku *Seri Kebanksentralan* berikutnya (Penyusunan Statistik Uang Beredar).

Secara garis besar, sisi pasiva (kewajiban) neraca otoritas moneter memuat komponen-komponen uang primer, yang terdiri dari (i) Uang kartal yang beredar di masyarakat maupun uang kartal yang ada di kas bank umum, dan (ii) Saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia

Sementara itu, sisi aktiva (kekayaan) neraca otoritas moneter memuat sumber atau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, yaitu:

(i) Aktiva Luar Negeri Bersih (*net foreign assets*)

Faktor atau sumber ini antara lain timbul sebagai akibat terjadinya transaksi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya penarikan dan pelunasan pinjaman luar negeri.

(ii) Aktiva Dalam Negeri Bersih (*net domestic assets*)

Faktor ini bersumber dari transaksi dalam bentuk mata uang domestik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta domestik, dan bank umum. Transaksi oleh pemerintah antara lain berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, tagihan kepada sektor swasta domestik dan bank umumantara lain berkaitan dengan pemberian bantuan likuiditas dalam rangka pelaksanaan fungsi *lender of last resort*.

(iii) Aktiva Lainnya Bersih (*net other items*)

Faktor atau sumber ini merupakan pos yang disediakan untuk menampung berbagai pos yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pos Modal dan Cadangan.

Penciptaan Uang oleh Bank Umum

Seperti yang telah dijelaskan, bank umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena bank umum mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana terciptanya uang giral dan uang kuasi tersebut?

Penciptaan uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui beberapa cara sebagai berikut.

(i) *Substitusi*, melalui proses substitusi ini seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito.

(ii) *Transformasi*, melalui proses transformasi ini bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito.

(iii) *Pemberian kredit*, melalui proses ini bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam proses substitusi dan transformasi terdapat kemungkinan terjadinya perpindahan bentuk dari uang giral ke uang kuasi melalui pemindahbukuan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik suku bunga deposito berjangka pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro. Namun, pergeseran tersebut tergantung pada daya tarik simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk giro. Sementara itu, dalam proses pemberian kredit pada umumnya tidak dibukukan sebagai tabungan atau deposito karena, pada umumnya, suku bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan atau deposito.

Hubungan Uang Primer dengan Uang Beredar:

Keberadaan Angka Pelipat Ganda Uang

Setelah dibahas proses penciptaan uang baik oleh bank umum maupun otoritas moneter dan sekilas mengenal uang primer (M0), uang beredar dalam arti sempit (M1), dan uang beredar dalam arti luas (M2), pada bagian ini akan dibahas hubungan antara M0 dengan M1 dan M0 dengan M2.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, uang primer atau M0 merupakan “inti” dalam proses penciptaan uang beredar. Sementara itu,

juga sudah diketahui bahwa bank sentral mempunyai kemampuan untuk mengendalikan uang primer yang berada pada sisi pasiva Neraca Otoritas Moneter. Apakah dengan demikian otoritas moneter dapat sepenuhnya mengendalikan uang beredar?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak mudah mengingat kemampuan otoritas moneter dalam mengatur jumlah uang beredar sangat tergantung pada berbagai faktor dan terutama karena bank umum juga mempunyai peranan dan kemampuan untuk menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sementara itu, uang beredar juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui terlebih dahulu konsep angka pelipat ganda uang (*money multiplier*). Konsep ini muncul sejalan dengan kondisi bahwa dalam menciptakan uang giral dan uang kuasi bank tidak harus menjamin sepenuhnya uang tersebut dengan uang tunai yang ada di kasnya. Berikut ini ilustrasi yang sangat sederhana untuk memahami keberadaan angka pelipat ganda uang tersebut.

Misalnya, seorang nasabah mempunyai uang tunai sebesar Rp1 juta yang disimpan dalam rekening tabungannya di Bank A. Bank A sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tentunya tidak akan menahan uang begitu saja. Karena atas rekening tabungan tersebut Bank A harus membayar biaya bunga maka dana yang berasal dari tabungan tersebut akan kembali ditanamkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit. Tentu saja Bank A tidak dapat menanamkan seluruh dana yang disimpan masyarakat untuk pemberian kredit karena Bank A harus mempertimbangkan pula keperluan lainnya, misalnya menyimpan dana untuk keperluan berjaga-jaga atau memenuhi ketentuan bank sentral yang umumnya juga mewajibkan kepada seluruh bank umum untuk menyimpan sebagian dananya di bank sentral. Ketentuan bank sentral tersebut sering disebut sebagai *Reserve Requirement*, yang di Indonesia dikenal dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Pada saat ini Bank Indonesia menetapkan GWM dalam rupiah sebesar 5% dari seluruh simpanan masyarakat.[26]

---

[26] Sebagaimana diatur, bank umum wajib memelihara GWM atas simpanan masyarakat di bank baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari total dana yang disimpan masyarakat di bank (dana pihak ketiga), yang

Misalnya, semua bank umum hanya mempertimbangkan pemenuhan kewajiban atas ketentuan GWM yang telah ditetapkan, yaitu 5%. Dengan demikian, Bank A harus menyisakan untuk cadangan sebesar 5% x Rp1 juta atau sebesar Rp50 ribu sehingga Bank A masih dapat memberikan kredit sebesar Rp950.000,00. Proses tersebut tidak berhenti sampai di sini. Misalnya, penerima kredit tersebut menyimpan dana tersebut di Bank B maka proses yang terjadi adalah seperti pada Bank A. Selanjutnya, Bank B menahan dana sebesar 5% dari Rp950.000,00 atau sebesar Rp47.500,00 dan menyalurkan sisanya sebesar Rp902.500,00 ke pihak lain dalam bentuk kredit. Demikian pula, seandainya pihak lain tersebut menyimpan dana tersebut ke Bank C maka proses yang terjadi adalah seperti pada Bank A dan Bank B. Dalam hal ini, Bank C menahan dana sebesar 5% dari Rp902.500,00 atau sebesar Rp45.125,00 dan menyalurkan sisanya sebesar Rp857.375,00 ke pihak lain dalam bentuk kredit. Proses ini berlangsung seterusnya sampai waktu yang tidak terhingga. Apabila diasumsikan bahwa ketentuan GWM sebesar 5% tersebut berlangsung terus dan dalam proses tersebut tidak terdapat *kebocoran*, baik berupa biaya transaksi/administrasi maupun penyimpangan perilaku bank umum dan masyarakat dalam mengelola dananya, maka potensi penyaluran kredit dapat dihitung secara sederhana, yaitu:

$$1 \text{ juta} + [(1 - 5\%) \times 1 \text{ juta}] + [(1 - 5\%)^2 \times 1 \text{ juta}] + [(1 - 5\%)^3 \times 1 \text{ juta}] + \ldots = 1 \text{ juta} + 950.000 + 902.500 + 857.375 + \ldots = 20 \text{ juta}$$

Penjumlahan angka tersebut dapat dituliskan dalam rumus sederhana, yaitu:

$$1/(5\%) \times 1 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$$

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses penciptaan uang beredar penambahan uang primer sebesar Rp1 juta dapat mengakibatkan pertambahan uang beredar menjadi sekitar Rp20 juta, yaitu dalam bentuk kredit. Hal ini terjadi karena terdapat faktor yang "melipatgandakan" uang

terdiri dari giro, deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban-kewajiban lainnya tanpa melihat jangka waktu. Dalam pada itu, GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 3% dari dana pihak ketiga. Ketentuan GWM tersebut diatur secara rinci dalam SK Dir BI No. 30/89A/KEP/DIR, SE BI No. 3010/UPPB, dan SE BI No. 31/10/UPPB masing-masing tanggal 20/10/1997, serta SK DIR BI No. 28/113/KEP/DIR tanggal 14/12/1995. Dalam praktik, ketentuan GWM atau *reserve requirement* dianggap sebagai piranti kebijakan moneter. Pembahasan lebih detail mengenai ketentuan ini akan disampaikan pada buku *Seri Kebanksentralan* berikutnya (Intrumen-instrumen Pengendalian Moneter).

primer tersebut, yaitu sekitar 20 kali. Besarnya pelipatgandaan yang terjadi tentunya tergantung pada perilaku otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Berdasarkan contoh di atas, misalnya otoritas moneter mengubah rasio GWM dari 5% menjadi 1%, maka uang beredar akan dapat bertambah menjadi 1/(1%) x 1 juta, atau Rp100 juta.

Perlu ditekankan bahwa uraian di atas hanya mempertimbangkan perilaku otoritas moneter. Pengamatan terhadap proses penciptaan uang beredar yang lebih lengkap tentunya harus mempertimbangkan perilaku bank umum dan masyarakat secara keseluruhan. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Seperti telah diketahui, dari Neraca Otoritas Moneter diketahui bahwa secara umum, uang primer terdiri dari uang kartal (C) dan saldo giro bank umum di bank sentral (R) atau dapat diformulasikan dalam persamaan sebagi berikut.[27]

$$M0 = C + R \qquad \text{.... (1)}$$

Sementara itu, berdasarkan Neraca Sistem Moneter, uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri uang kartal (C) dan uang giral (D) sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi (T).[28] Konsep tersebut dapat diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut.

$$M1 = C + D \qquad \text{.... (2)}$$

$$M2 = C + D + T \qquad \text{.... (3)}$$

Dengan menyederhandakan C/D = c, T/D = t, dan R/(D+T) = r, maka didapatkan angka pelipat ganda uang untuk masing-masing M1 dan M2

[27] Untuk mempermudah penghitungan selanjutnya dalam kasus Indonesia, termasuk dalam komponen uang kartal adalah saldo giro masyarakat di Bank Indonesia (lihat Diagram 1).

[28] Neraca Sistem Moneter merupakan necara konsolidasi antara Neraca Otoritas Moneter dan Neraca Gabungan Bank Umum. Penjelasan detail mengenai penyusunan Neraca Sistem Moneter akan disampaikan dalam buku *Seri Kebanksentralan* berikutnya (Penyusunan Statistik Uang Beredar).

(yang disimbolkan dengan mm1 dan mm2) yang dapat menggambarkan interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat, yaitu:

$$mm1 = M1/M0 = \frac{c + 1}{c + [r \times (t + 1)]} \qquad \text{…. (4)}$$

$$mm2 = M2/M0 = \frac{c + t + 1}{c + [r \times (t + 1)]} \qquad \text{…. (5)}$$

Formulasi di atas merupakan definisi angka pelipat ganda uang, yaitu perbandingan atau rasio uang beredar terhadap uang primer. [29]

Pada hakikatnya, c, t, dan r merupakan determinan angka pelipat ganda uang. c adalah rasio uang kartal terhadap uang giral atau sering disebut *currency ratio*. t adalah rasio tabungan dan deposito (uang kuasi) terhadap uang giral atau sering disebut *time and savings deposit ratio*. r adalah

---

[29] Penghitungan angka pelipat ganda uang dapat dilakukan melalui beberapa cara (algoritma). Salah satunya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, membagi M1 dan M2 masing-masing dengan M0 untuk mendapatkan hubungan sebagai berikut.

Untuk M1:

$$\begin{aligned} M1/M0 &= (C + D)/(C + R) \\ &= ((C/D) + (D/D)) / ((C/D) + (R/D)) \\ &= ((C/D) + 1) / ((C/D) + ((R/D) \times ((D + T)/(D + T))) \\ &= ((C/D) + 1) / ((C/D) + ((R/(D + T)) \times ((T/D)+1))) \qquad \text{……. (4a)} \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, untuk M2 kita akan mendapatkan hasil:

$$M2/M0 = ((C/D) + (T/D) + 1) / ((C/D) + ((R/(D + T)) \times ((T/D)+1))) \qquad \text{…… (5a)}$$

Dengan menyederhandakan C/D = c, T/D = t, dan R/(D+T) = r, serta mengalikan kembali kedua sisi persamaan (1) dan (2), kita mendapatkan hubungan:

$$M1 = \frac{c + 1}{c + [r \times (t + 1)]} \times M0 \qquad \text{…….. (4b)}$$

$$M2 = \frac{c + t + 1}{c + [r \times (t + 1)]} \times M0 \qquad \text{…….. (5b)}$$

Persamaan (4b) dan (5b) di atas pada hakikatnya menunjukkan hubungan antara uang beredar dengan uang primer dan suatu fraksi faktor pengali, yaitu yang dikenal sebagai angka pelipat ganda uang atau *money multiplier* (mm).

rasio cadangan bank terhadap total simpanan yang meliputi uang giral dan uang kuasi atau sering disebut sebagai *reserve ratio*. Apabila dikaitkan dengan contoh sebelumnya yang hanya mempertimbangkan perilaku otoritas moneter, penghitungan angka pelipat ganda uang hanya mempertimbangkan determinan *reserve ratio* (r), yaitu dalam bentuk rasio ketentuan GWM. Setelah mempertimbangkan interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat, tidak hanya *reserve ratio* (r) yang diperhitungkan namun juga determinan lain, yaitu *currency ratio* (c) dan *time and savings deposit ratio* (t).

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa naik turunnya angka pelipat ganda uang dipengaruhi oleh ketiga determinan angka pelipat ganda uang, yaitu *currency ratio, time and savings deposit ratio,* dan *reserve ratio*. Perlu dikemukakan bahwa perkembangan angka pelipat ganda uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah-ubah sejalan dengan pola interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Angka pelipat ganda uang di Indonesia dalam tiga dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 4.
Perkembangan Angka Pelipatganda Uang
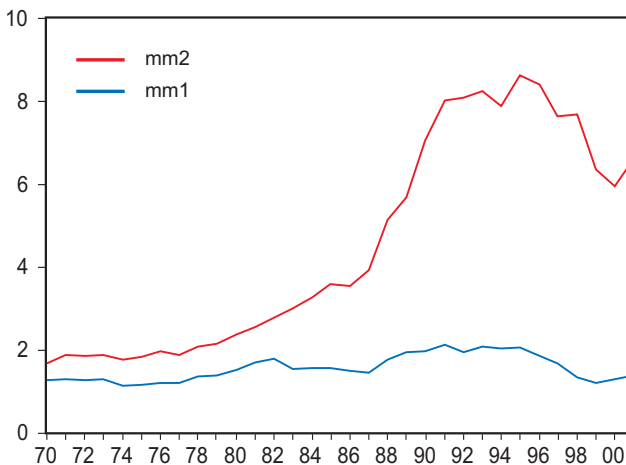
Berikut akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi determinan-determinan angka pelipat ganda uang tersebut.

Currency Ratio (c)

Tinggi rendahnya *currency ratio* pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kartal atau uang giral. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, antara lain biaya pemegangan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan uang kartal atau uang giral.

a. Biaya penggunaan uang giral

Dalam hal memilih untuk menggunakan uang kartal atau uang giral, masyarakat tentunya akan memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dari penggunaan uang tersebut, antara lain biaya transportasi menuju ke bank dan biaya pemeliharaan rekening giro yang dikenakan oleh bank. Dalam perekonomian yang kurang maju, khususnya di daerah yang tidak didukung oleh sektor perbankan dengan baik, biaya tersebut bisa jadi merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat, terutama kalau mengingat pemeliharaan rekening giro yang umumnya tidak diberikan bunga; kalau pun ada, bunga atau jasa giro yang diberikan sangat rendah.[30] Dalam hal terdapat bunga atau jasa giro, masyarakat akan memperhitungkan biaya penggunaan yang timbul, yaitu biaya pemeliharaan rekening dikurangi jasa giro. Dalam kasus ini, biasanya biaya pemegangan uang giral lebih tinggi dibandingkan dengan bunga atau jasa giro sehingga masyarakat cenderung memegang uang kartal daripada uang giral. Dapat disimpulkan bahwa rasio uang kartal terhadap uang giral berubah searah dengan biaya penggunaan uang giral.

---

[30] Dalam beberapa analis, biaya untuk menahan uang kuasi relatif terhadap biaya menahan uang kartal dan uang giral (yang dikaitkan dengan adanya bunga/jasa giro yang diberikan oleh bank) juga dianggap sebagai faktor utama dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang kartal atau uang giral. Namun, hal ini harus diperhitungkan dengan hati-hati mengingat kedekatan karakteristik uang giral dan uang kartal sebagai alat pembayaran tunai. Dengan pertimbangan ini, isyu mengenai suku bunga giro menjadi kurang relevan.

b. Kenyamanan dan Keamanan

Namun, kondisi yang diuraikan di atas bukan merupakan kasus dalam perekonomian yang sudah maju, yang masyarakatnya akan mempertimbangkan faktor lain yang dianggap lebih relevan, antara lain kenyaman dan keamanan. Dua faktor tersebut merupakan dua di antara beberapa kelebihan uang giral apabila dibandingkan dengan uang kartal. Untuk transaksi dalam jumlah yang relatif besar, pembayaran dengan menggunakan uang giral dapat dilakukan dengan lebih praktis dan mudah karena selain dapat dilakukan melalui transfer, pembayaran tersebut juga tidak memerlukan pecahan tertentu dan sebagainya. Selain itu, penyimpanan dalam bentuk uang giral lebih aman dari pencurian, kebakaran, dan sebagainya.

Currency ratio di Indonesia dalam tiga dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, khususnya di sektor keuangan, *currency ratio* secara umum cenderung mengalami penurunan.

Grafik 5a.
Perkembangan Currency Ratio
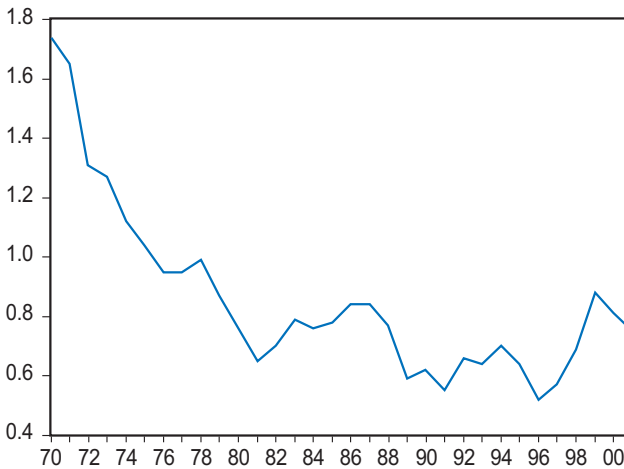
Sumber : Bank Indonesia

Time and savings deposit ratio (t)

Tinggi rendahnya time deposit ratio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kuasi atau uang giral. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, antara lain biaya relatif (*oportunity cost*), pendapatan masyarakat, dan inovasi atau kemajuan layanan sektor perbankan.

a. Biaya relatif (*oportunity cost*)

   Pertama, perlu diasumsikan terlebih dahulu bahwa terdapat bunga atau jasa giro walaupun relatif sangat rendah. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah secara berlawanan arah dengan biaya untuk menahan uang kuasi relatif terhadap biaya menahan uang giral. Biaya relatif menahan uang kuasi adalah sebesar suku bunga pasar dikurangi dengan suku bunga yang dibayarkan untuk uang kuasi.[31] Biaya relatif untuk menahan uang giral adalah suku bunga pasar dikurangi dengan suku bunga rekening giro. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral berubah searah dengan suku bunga untuk uang kuasi dan berlawanan arah dengan suku bunga untuk uang giral.

b. Pendapatan masyarakat

   Seperti halnya rasio uang kartal terhadap uang giral, perubahan pendapatan pada umumnya akan mendorong perubahan rasio uang kuasi terhadap uang giral, sepanjang kedua jenis uang tersebut mempunyai respon (elastisitas) terhadap pendapatan yang berbeda. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa uang kuasi lebih elastis terhadap pendapatan dibandingkan dengan uang giral. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah searah dengan perubahan tingkat pendapatan.

c. Kemajuan layanan sektor perbankan

   Dalam kondisi belum terdapatnya layanan bank secara otomatis melalui layanan elektronis, untuk dapat menggunakan uang kuasi dalam ber-

---

[31] Suku bunga pasar yang dimaksud adalah suku bunga yang umumnya dikenakan dalam penggunaan produk keuangan lain yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penanaman dana.

transaksi seseorang mengorbankan waktu, biaya, dan ketidaknyamanan, misalnya harus pergi ke lokasi tertentu tempat bank berada baik untuk melakukan penarikan secara tunai maupun transfer dana ke rekening gironya terlebih dahulu (agar dapat menggunakan cek). Dengan adanya inovasi produk perbankan yang memberikan kemudahan layanan kepada nasabah, seperti ATM, transfer elektronis melalui internet atau telepon, pengorbanan waktu, biaya, dan ketidaknyamanan seperti di atas dapat dikurangi secara berarti. Dengan demikian, layanan sektor perbankan yang semakin maju mendorong masyarakat untuk menggunakan uang kuasi sehingga rasio uang kuasi terhadap uang giral akan meningkat.

Time and savings deposit ratio di Indonesia dalam tiga dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, khususnya di sektor keuangan, sejak tahun 1983 *time and savings deposit ratio* mengalami peningkatan yang berarti secara terus-menerus. Seperti diketahui, sejalan dengan Kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, pagu suku bunga dan kredit dihapuskan. Hal ini

Grafik 5b.
Perkembangan Time and Savings Deposit Ratio
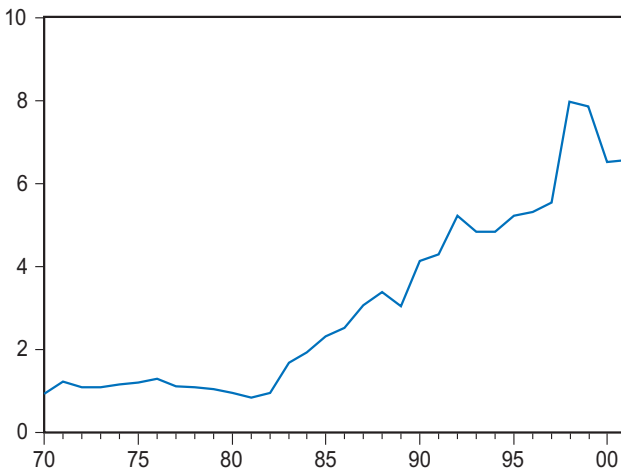
mendorong peningkatan suku bunga simpanan, yang selanjutnya mendorong mobilisasi dana masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kebijakan deregulasi tersebut secara mendasar juga ikut mendorong perubahan struktural perekonomian Indonesia, khususnya sektor keuangan. Hal ini antara lain tercermin pada meningkatnya tingkat penggunaan uang (*monetisasi*) di masyarakat serta menurunnya tingkat perputaran uang dalam perekonomian. (Boks: *Tingkat Penggunaan dan Perputaran Uang di Indonesia*)

Reserve ratio (r)

Dalam pelaksanaan operasional kegiatan bank, jumlah uang tunai yang dicadangan secara total sebenarnya susah untuk dihitung. Hal ini mengingat jumlah cadangan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu komponen dengan jumlah tetap dan komponen lainnya yang merupakan kelebihan dari jumlah tetap. Komponen pertama yang tentunya dapat diperkirakan jumlahnya dikenal sebagai cadangan resmi (*legal reserve*). Sementara itu, komponen kedua adalah kelebihan cadangan (*excess reserve*). Dengan demikian, *reserve ratio* dapat dibagi menjadi dua komponen juga, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat (*legal reserve ratio*) yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter dan rasio kelebihan cadangan terhadap simpanan masyarakat (*excess reserve ratio*) yang dipengaruhi oleh keperluan bank akan likuiditas jangka pendek.

a. Ketentuan otoritas moneter

   Perubahan *legal reserve ratio* hanya terjadi apabila bank sentral atau otoritas moneter menghendakinya dalam rangka pengaturan uang beredar. Berlainan dengan *currency ratio* dan *time deposit ratio* yang berubah secara berarti hanya dalam jangka panjang sebagai akibat pengaruh perubahan struktur dan perkembangan ekonomi umunya serta tingkat pendapatan masyarakat khususnya, *legal reserve ratio* dapat sewaktu-waktu diubah oleh bank sentral, baik rasio maupun komponennya.

b. Likuiditas bank

   Perubahan *excess reserve ratio* sangat dipengaruhi oleh pengelolaan likuiditas atau kekayaan yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh

bank-bank. Sebagai contoh, bank-bank yang dana pihak ketiganya sebagian besar terdiri dari simpanan dalam bentuk giro tentunya akan memelihara likuiditas yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang dana pihak ketiganya sebagian besar terdiri dari deposito. Dalam kondisi yang demikian, jumlah *excess reserve* bank tersebut juga akan lebih besar dan rasio likuiditas lebihnya juga akan lebih besar. Sudah tentu bank-bank pada umumnya akan berusaha untuk menjaga keseimbangan penyebaran antara dana yang berjangka pendek dan yang berjangka panjang sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank yang bersangkutan. Secara umum, bank-bank akan berusaha memperkecil kelebihan likuiditas. Apabila bank ingin meningkatkan potensi penggunaan dananya agar dapat memperoleh keuntungan lebih maka bank tersebut akan berusaha mengatur kelebihan cadangannya serendah mungkin. Namun, apabila bank ingin menjaga tingkat likuiditasnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan uang kartal oleh nasabahnya maka bank tersebut akan memelihara kelebihan cadangannya cukup tinggi.

Grafik 5c.
Perkembangan Reserve Ratio
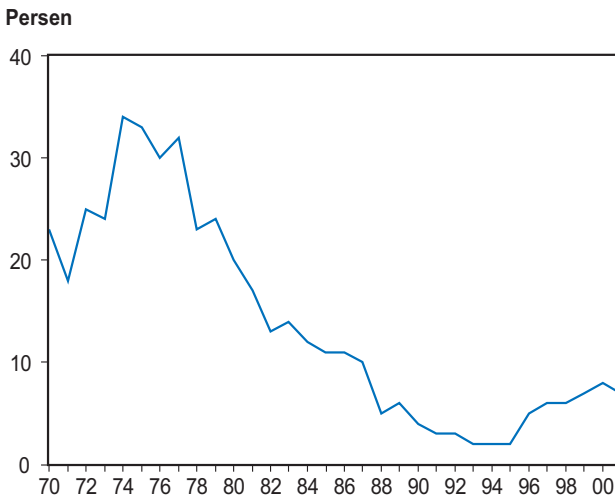
Sumber : Bank Indonesia

Reserve ratio di Indonesia dalam tiga dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah. Perkembangan *reserve ratio* sangat terkait dengan perkembangan kebijakan penetapan *reserve requirement* (RR) oleh Bank Indonesia. Rasio ini mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 1970-an sebagai akibat kebijakan penetapan RR sebesar 30% pada tahun 1973 (pada saat *oil boom*). Penurunan rasio secara berarti terus terjadi, sejalan dengan penurunan RR menjadi 15% pada tahun 1977 dan 2% pada tahun 1988. Peningkatan *reserve rasio* selanjutnya terjadi sejalan dengan peningkatan RR (GWM dalam rupiah) secara berturut-turut menjadi 3% pada tahun 1996 dan 5% pada tahun 1997.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar

Dari penjelasan yang runtun di atas telah diketahui bagaimana hubungan uang primer dengan uang beredar dicerminkan oleh keberadaan angka pelipat ganda uang. Kita juga telah mencermati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan baik uang primer maupun angka pelipat ganda uang. Dengan arah pemikiran yang sederhana kita dapat pula memahami bahwa uang beredar merupakan hasil pengalian uang primer dengan angka pelipat ganda uang. Pertanyaan selanjutnya adalah: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar itu sendiri? Jawabannya tidak terlalu sulit.

Mari kita cermati kembali persamaan (4) – (5). Dari hubungan yang telah dijelaskan sebelumya kita mendapatkan :

$$M1 = mm1 \times M0$$

$$M2 = mm2 \times M0$$

Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang perubahannya (disimbolkan dengan tanda Δ — dibaca *delta*), maka kita akan mendapatkan pula hubungan di atas sebagai:

$$\Delta M1 = mm1 \times \Delta M0$$

$$\Delta M2 = mm2 \times \Delta M0$$

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

(i) Faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang

Faktor-faktor ini tidak lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri (c, t, dan r), yaitu antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyaman dan keamanan, biaya relatif (*opportunity cost*) — yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuditas jangka pendek.

(ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer

Faktor-faktor ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos-pos Neraca Otoritas Moneter, baik dari sisi penggunaan uang primer (uang kartal dan saldo giro/ cadangan bank umum di bank sentral) maupun faktor yang mempengaruhi uang primer (aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih, dan aktiva lainnya bersih).

Pada komponen penggunaan, perubahan uang primer dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan uang kartal yang umumnya terkait dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu negara, khususnya sektor keuangannya. Sementara itu, penentuan besarnya cadangan bank yang disimpan di bank sentral dan perubahan-perubahan yang terjadi pada transaksi keuangan pada sisi aktiva Neraca Otoritas Moneter lebih terkait dengan struktur dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, apakah suatu negara memiliki sektor ekspor yang kompetitif dan struktur keuangan pemerintah yang kuat.

Sementara itu, dari faktor-faktor yang mempengaruhi, perubahan uang primer sangat terkait dengan beberapa faktor utama, antara lain pola transaksi masyarakat dengan luar negeri (misalnya ekspor-impor dan aliran modal), perkembangan dan mekanisme di bidang perkreditan, serta manajemen keuangan pemerintah yang tercermin pada stuktur anggaran belanja pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Dengan demikian, secara garis besar dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar, antara lain: tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas moneter, dan faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Boks:
Tingkat Penggunaan dan Perputaran Uang di Indonesia

Secara umum, tingkat penggunaan uang (*tingkat monetisasi*) dalam suatu masyarakat menunjukkan berapa banyak uang yang digunakan untuk setiap volume transaksi ekonomi yang dilakukan, seperti perdagangan dan perindustrian. Tingkat penggunaan uang tersebut biasanya diukur dari perbandingan (rasio) uang beredar terhadap pendapatan nasional. Dengan demikian, tingkat penggunaan uang sangat terkait dengan kemajuan faktor kelembagaan dan tingginya tingkat pendapatan suatu masyarakat. Dalam hal ini, untuk setiap volume transaksi ekonomi, masyarakat industri/perdagangan menggunakan jumlah uang yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat agraris/tradisional. Contoh sederhananya ialah perbandingan pembayaran uang sekolah di daerah-daerah pedesaan yang masih tradisional dengan daerah perkotaan yang sudah maju. Di desa-desa tersebut masih banyak dijumpai siswa yang membayar biaya sekolah dengan menggunakan hasil-hasil bumi, misalnya kelapa dan beras atau pun hasil ternak, seperti telor. Sementara itu, di perkotaan hal tersebut sangatlah jarang ditemukan. Mereka pada umumnya sudah mampu untuk membayar biaya sekolahnya dengan menggunakan uang.

Sementara itu, tingkat perputaran uang mencerminkan tingkat rata-rata perputaran/perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya. Agak berbeda dengan tingkat penggunaan uang, tingkat perputaran uang mempunyai ukuran yang bervariasi mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi perubahannya. Namun, ukuran yang umum digunakan adalah perbandingan (rasio) pendapatan nasional terhadap uang. Kebalikan dengan tingkat penggunaan uang, dengan semakin majunya suatu masyarakat, tingkat perputaran uang menjadi semakin rendah. Hal ini mengingat masyarakat yang sudah maju tidak banyak menggunakan uang kertas dan logam. Selain itu,

mereka lebih banyak menggunakan uang jenis lainnya serta sekaligus menanamkan uangnya untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan. Hal tersebut relatif mudah dengan semakin majunya sistem keuangan.

Dengan menggunakan data tahunan, perkembangan tingkat penggunaan dan perputaran uang di Indonesia dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 1.
Perkembangan Tingkat Penggunaan dan Perputaran Uang di Indonesia

Indikator	1970	1983	1988	1998	2001
M1/PDB	0.07	0.10	0.10	0.11	0.12
M2/PDB	0.09	0.19	0.28	0.60	0.57
PDB/M1	14.15	10.26	10.38	9.47	8.39
PDB/M2	10.62	5.29	3.56	1.66	1.77

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Grafik 6.
Perkembangan Tingkat Penggunaan Uang
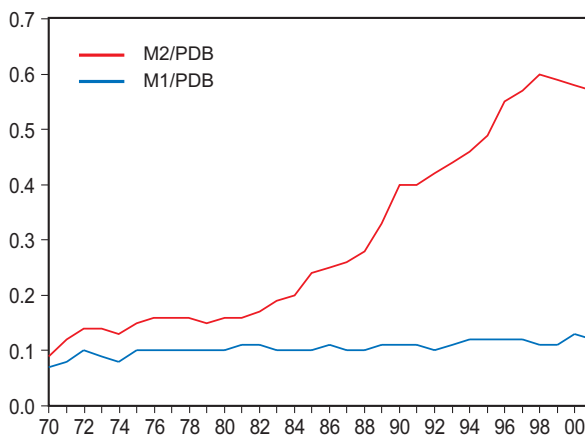
Sumber: Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik

Grafik 7.
Perkembangan Tingkat Perputaran Uang
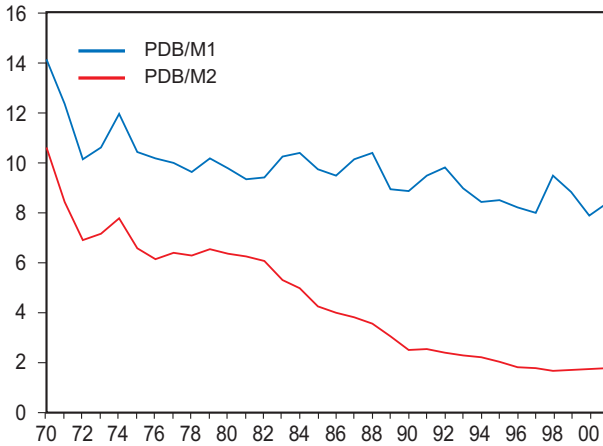
Sumber: Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik

Sebagaimana terlihat, dalam perjalanan sejarah perekonomian Indonesia, perilaku kedua indikator tersebut bervariasi, sejalan dengan perkembangan kondisi struktural, kelembagaan, dan kebijakan di bidang ekonomi di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, sejak 1983 perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktural yang pesat sebagai akibat dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ekonomi mendasar baik di sektor keuangan, perpajakan, maupun investasi dan perdagangan. Secara khusus, pada 1 Juni 1983 Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang perbankan. Kebijakan yang meniadakan pembatasan jumlah pemberian kredit dan suku bunga ini menjadikan sektor keuangan Indonesia berkembang sangat pesat.

Sebagaimana dilihat, sementara tingkat penggunaan uang M1 relatif konstan, tingkat penggunaan uang M2 terus mengalami peningkatan secara berarti, dari 0.19 pada tahun 1983 menjadi 0.28 pada tahun 1988. Selanjutnya, sebagai akibat kebijakan lainnya, yaitu Paket Oktober 1988 (Pakto), rasio tersebut melipat ganda menjadi

0.60 pada awal periode terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Mengingat krisis tersebut berdampak menyeluruh, termasuk terhadap perkembangan uang beredar dan *output* nasional (PDB), rasio kedua indikator tersebut tidak berubah banyak pada periode pasca krisis, yaitu menjadi 0.57 pada akhir tahun 2001.

Sebagaimana dapat diperkirakan, tingkat perputaran uang mengalami penurunan secara proposional, sejalan dengan peningkatan penggunaan uang. Sekali lagi, tingkat perputaran uang M2 cenderung mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan uang M1.

Peranan Uang dalam Perekonomian

Dalam pembicaraan sehari-hari mengenai kondisi perekonomian, masyarakat sering mengaitkan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga (inflasi), suku bunga, dsb. Sering dikatakan bahwa jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berkembang dengan sangat pesat. Apabila berlangsung terus, hal ini dianggap berbahaya karena harga barang-barang akan meningkat tajam. Sebaliknya, apabila uang beredar terlalu sedikit maka kegiatan ekonomi menjadi seret atau melambat. Sering juga dikatakan bahwa apabila uang beredar terlalu banyak maka suku bunga akan cenderung turun dan sebaliknya. Apakah pandangan-pandangan di atas sesuai dengan fakta yang terjadi? Apakah uang beredar mempunyai peranan dan keterkaitan yang erat dengan kegiatan suatu perekonomian? Bagaimana halnya dengan fakta yang terjadi dalam perekonomian Indonesia? Bab terakhir dari *Seri Kebanksentralan* ini akan diarahkan untuk menjelaskan sekaligus menjawab pandangan dan pertanyaan tersebut di atas.

Uang dan Kegiatan Ekonomi

Pada dasarnya, peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami karena semua kegiatan perekonomian moderen, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan, dalam perkembangannya uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang namun uang itu sendiri juga menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang.

Bagaimana melihat peranan uang seperti yang telah dipaparkan di atas? Salah satu cara adalah dengan memahami bagaimana aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian. Perlu diketahui bahwa perkembangan kegiatan suatu perekonomian pada

dasarnya dapat diamati dari dua sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor riil (barang dan jasa) dan sektor moneter (uang). Sektor riil dan sektor moneter tidak hanya berkaitan erat, kedua sektor tersebut bahkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi jual-beli akan terdapat penjual yang memiliki barang dan pembeli yang memiliki uang. Pembeli memiliki uang tetapi membutuhkan barang, sementara penjual memiliki barang tetapi membutuhkan uang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan maka nilai transaksi jual-beli barang dan jasa harus sama dengan nilai uang yang diserahterimakan.[32]

Ilustrasi sederhana mengenai aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan fungsi uang sebagaimana telah diuraikan dalam bab pertama, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonominya baik berupa kegiatan produksi, investasi, maupun konsumsi. Sebagaimana diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut selalu terdapat dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang atau dana. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu produk perusahaan membutuhkan *input,* misalnya berupa bahan baku dan tenaga kerja. Dalam proses tersebut perusahaan akan membeli bahan baku dan menyewa tenaga (keahlian) dari masyarakat sehingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat. Pada saat yang sama juga terjadi aliran uang dari perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang dibeli

---

[32] Dalam ilmu ekonomi moneter, hubungan tersebut dijelaskan melalui teori Teori Kuantitas Uang. Fokus utama teori aliran Klasik ini adalah hubungan antara perubahan jumlah uang beredar dan tingkat harga. Irving Fisher menjelaskan hubungan tersebut melalui persamaan: M x V = P x T. Dalam hal ini, M adalah jumlah uang dalam masyarakat, V adalah tingkat rata-rata perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain (*transaction velocity of circulation* atau *income velocity*), P adalah harga rata-rata suatu barang, dan T adalah volume transaksi. Yang menjadi perhatian di sini adalah kondisi V dan T yang dianggap konstan (tidak berubah) dalam jangka waktu pendek. Variabel-veriabel tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat. Salah satu implikasi yang terpenting ialah bahwa dalam jangka pendek tingkat harga umum (P) berubah secara proposional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, sejalan dengan perubahan T, perubahan uang beredar mempunyai pengaruh terhadap tingkat *output* (nominal) masyarakat.

tersebut. Aliran uang keluar tersebut bagi perusahaan akan menjadi pos biaya, sementara bagi masyarakat, aliran uang masuk tersebut merupakan pos pendapatan. Sementara itu, setelah perusahaan menghasilkan suatu produk dan menjualnya ke masyarakat akan terjadi aliran uang keluar dari masyarakat dan sebaliknya terjadi aliran uang masuk yang merupakan pendapatan perusahan. Mekanisme yang serupa juga terjadi pada kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perekonomian aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa.

Uang dan Suku Bunga

Dalam bab tiga telah diuraikan secara singkat mekanisme penciptaan uang, yaitu bahwa penciptaan uang beredar pada dasarnya ditentukan atau dipengaruhi oleh otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Jumlah uang beredar yang tercipta tersebut merupakan jumlah uang yang ditinjau dari penyediaannya atau *sisi penawaran*. Sementara itu, dari *sisi permintaan*, masyarakat membutuhkan uang, baik uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi, untuk membiayai semua kegiatan ekonominya. Idealnya, jumlah uang yang tercipta atau tersedia harus seimbang jumlah uang yang dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah uang yang beredar. Dalam praktik, permintaan masyarakat akan uang sulit diperhitungkan mengingat kebutuhan masyarakat akan uang tersebut tidak hanya dilandasi oleh motif untuk melakukan transaksi saja namun juga motif lainnya, yaitu untuk berjaga-jaga atau bahkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif.[33]

Sesuai dengan *hukum permintaan* pasar, apabila jumlah uang yang disediakan melebihi jumlah uang yang diminta maka akan terjadi kelebihan penyediaan uang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan harga uang atau suku bunga.[34] Sebaliknya, apabila jumlah uang yang di-

[33] Dalam ilmu ekonomi moneter, motif masyarakat yang beragam dalam memegang uang tersebut merupakan landasan Teori Permintaan Uang (*Demand for Money Theory*).

[34] Dalam ilmu ekonomi moneter, salah satu teori yang menjelaskan keterkaitan antara suku bunga dengan permintaan/penyediaan dana (uang) adalah Teori Dana yang Dapat Dipinjamkan (*the Loanable Fund Theory*).

minta melebihi jumlah uang yang disediakan maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau suku bunga. Perlu dikemukakan bahwa suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga keseimbangan pasar, yiatu suku bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan (sisi penawaran uang) dan suku bunga pinjaman (sisi permintaan uang).

Dari hubungan di atas dapat dipahami bahwa perubahan suku bunga dapat terjadi sebagai akibat adanya perubahan jumlah uang beredar yang mencerminkan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Bagaimana hubungan antara uang dan suku bunga yang terjadi pada perekonomian Indonesia? Hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik pertumbuhan tahunan uang beredar dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di bawah ini.[35] Dalam hal ini diasumsikan bahwa perkembangan suku bunga SBI menjadi acuan bagi perkembangan suku-suku bunga lainnya, baik suku bunga simpanan, suku pinjaman, maupun suku bunga untuk transaksi di pasar uang (dengan tenggang waktu atau *time lag* tertentu).[36]

Grafik 8a.
Pertumbuhan M1 dan Suku Bunga SBI (Tahunan)
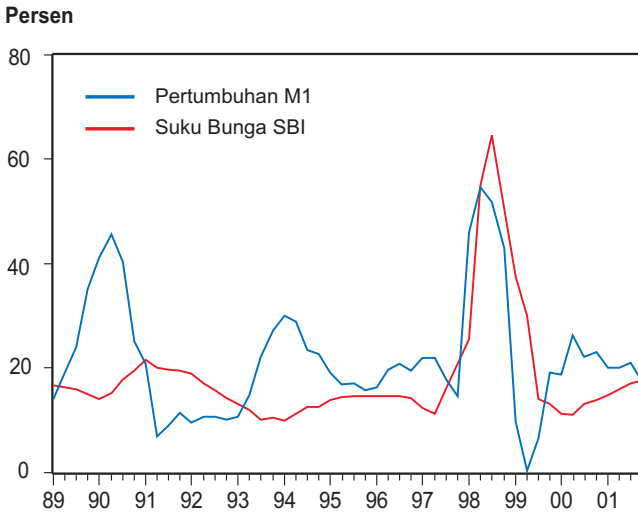
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8b.
Pertumbuhan M2 dan Suku Bunga SBI (Tahunan)
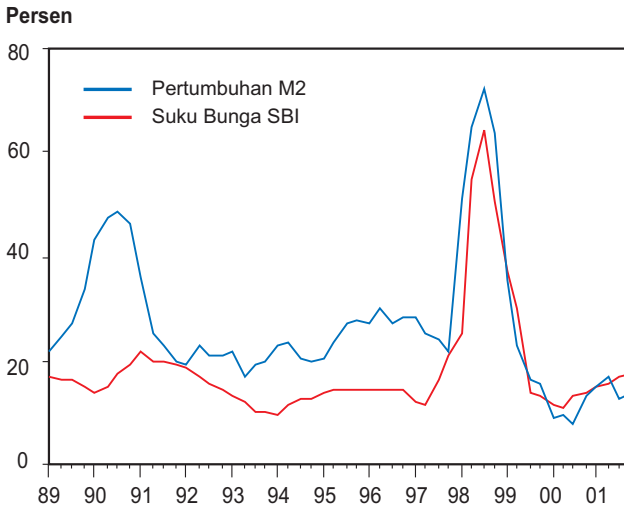
Sumber : Bank Indonesia

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas, kecuali pada periode 1999-2000, hubungan antara uang beredar baik M1 maupun M2 dengan suku bunga adalah sejalan seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam hal ini, pada saat uang beredar berkembang pesat suku bunga mengalami penurunan. Pada periode 1999-2000, saat krisis melanda perekonomian Indonesia, hubungan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu

---

[35]Pertumbuhan tahunan dihitung berdasarkan perubahan jumlah pada periode saat ini terhadap jumlah pada periode 1 tahun sebelumnya. Dapat dituliskan sebagai berikut: [Pertumbuhan tahunan Uang saat ini] = {[jumlah Uang Beredar saat ini] : [jumlah Uang Beredar 1 tahun lalu] – 1} x 100. Misalnya, jika jumlah uang beredar tahun 2000 dan 2001 masing-masing adalah 1000 dan 1100 maka pertumbuhan uang beredar tahun 2001 adalah {(1100 : 1000) – 1} x 100 = 10 %.

Dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia dapat mempengaruhi suku bunga SBI yang ditetapkan dalam rangka operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia. Pembahasan lebih detail mengenai operasi pasar terbuka dapat dilihat pada buku *Seri Kebanksentralan* yang lain: Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter.

[36] Beberapa penelitian yang dilakukan di Bank Indonesia mendukung pernyataan ini. Pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain biasanya terasa setelah beberapa tenggang waktu tertentu, misalnya tiga bulan. Tenggang waktu (*time lag*) ini antara lain berkaitan dengan proses pengambilan keputusan para pelaku ekonomi dalam merespon perkembangan yang terjadi.

perkembangan uang beredar yang pesat disertai dengan suku bunga yang juga tinggi.[37]

Uang dan Kegiatan Ekonomi Sektor Riil

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat pada umumnya membutuhkan uang atau dana untuk membiayai kegiatan ekonominya di sektor riil, seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Lalu, apa yang terjadi apabila jumlah uang yang tersedia sangat terbatas sehingga tidak dapat membiayai kegiatan ekonomi tersebut sepenuhnya? Atau sebaliknya, apa yang terjadi apabila jumlah uang yang tersedia begitu melimpah, sementara kegiatan ekonomi relatif kecil untuk dibiayai? Pertanyaan tersebut pada dasarnya mengarah pada pemahaman bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara uang dan kegiatan ekonomi di sektor riil, seperti yang telah disinggung pada awal bab ini.[38] Pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil pada dasarnya dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung uang dapat dijelaskan melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini, apabila terjadi penambahan jumlah uang beredar (misalnya sebagai akibat kebijakan bank sentral) maka suku bunga akan cenderung turun. Penurunan suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investasi, yang selanjutnya mendorong kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi pada umumya.

Bagaimana keterkaitan yang terjadi pada perekonomian Indonesia? Untuk melihat keterkaitan tersebut akan lebih mudah dilakukan dengan

---

[37] Mengapa hal ini dapat terjadi? Seperti telah diketahui, pada saat krisis ekonomi mencapai puncaknya pada tahun 1998 lalu kelangkaan dana pada perbankan yang terjadi begitu besar sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin melemah. Untuk mengatasi hal ini bank-bank umumnya menaikkan suku bunga secara drastis untuk menarik dana masyarakat. Kekhawatiran akan semakin memburuknya kondisi perekonomian mendorong Pemerintah (Bank Indonesia) untuk menyuntik dana ke pasar dalam jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar secara drastis.

[38] Keterkaitan antara uang dan kegiatan ekonomi paling tidak terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, terdapat keragaman pandangan mengenai pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Umumnya, disepakati bahwa dalam jangka panjang uang tidak mempengaruhi tingkat *output* riil (*neutrality of money*) namun hanya mempengaruhi tingkat *output* nominal dan harga. Hubbard, R. Glenn (2000).

menganalisis grafik pertumbuhan tahunan uang dan pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB).[39] Grafik tersebut secara tidak langsung mencerminkan naik-turunnya perkembangan kedua variabel tersebut dari waktu ke waktu.

Grafik 9a.
Pertumbuhan M1 dan PDB (Tahunan)
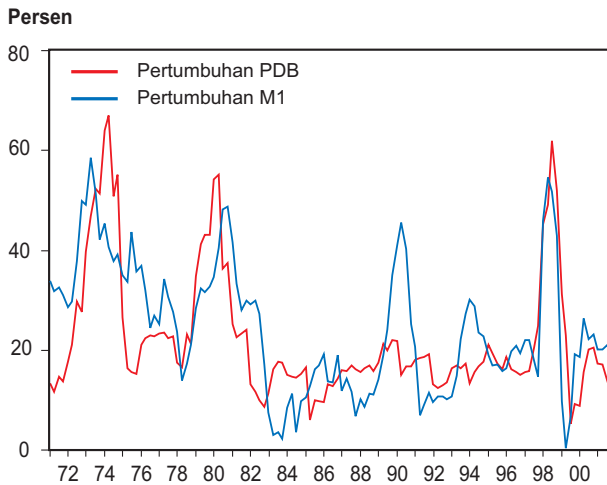
Sumber : Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik

---

[39] Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai PDB dapat dihitung dari sisi penggunaan, nilai tambah produksi dalam sektor-sektor ekonomi, dan pendapatan. Dari sisi penggunaan, nilai PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai konsumsi, investasi, dan transaksi ekspor-impor.

Grafik 9b.
Pertumbuhan M2 dan PDB (Tahunan)
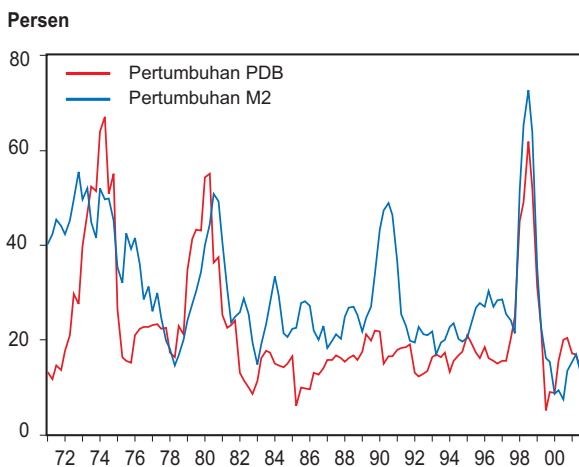
Sumber : Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik

Dari grafik di atas kita dapat melihat bahwa pada masa-masa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (secara nominal), pertumbuhan uang beredar, baik M1 dan M2, juga cukup tinggi. Masa-masa tersebut adalah periode awal tahun-tahun 1970-an dan 1980-an, saat perekonomian mengalami limpahan uang sebagai akibat kenaikan harga minyak di pasaran internasional. Demikian pula, pada periode krisis ekonomi pada akhir tahun 2000-an, keterkaitan antara pertumbuhan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi juga terlihat cukup erat. Sejalan dengan itu, pada masa-masa lainnya, pada saat pertumbuhan ekonomi cukup rendah (secara nominal) pertumbuhan uang beredar, baik M1 dan M2, juga terlihat cukup rendah.

Uang dan Harga

Pada bagian-bagian terdahulu telah dibahas secara berturut-turut keterkaitan uang dengan suku bunga dan keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi sektor riil. Keterkaitan uang dengan kedua variabel tersebut pada dasarnya menunjukkan peranan uang dalam mempengaruhi perkembangan

kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yang tercermin pada perkembangan permintaan agregat (*aggregate demand*) masyarakat akan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut tentunya harus didukung oleh *kapasitas ekonomi*, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan ketersediaan sumber daya yang mencukupi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam ilmu ekonomi makro, kondisi ini dikenal dengan penyediaan atau penawaran agregat (*aggregate supply*). Berbeda dengan permintaan agregat yang dapat berubah dalam jangka pendek, penawaran agregat relatif lebih sulit untuk berubah dalam jangka pendek. Dalam kaitan ini, perubahan penawaran agregat lebih terkait dengan struktur dan perkembangan suatu perekonomian.

Idealnya, permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Bagaimana apabila tidak? Apabila permintaan agregat tidak sama dengan penawaran agregat maka diperlukan penyesuaian kegiatan ekonomi agar terjadi kesesuaian (keseimbangan), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perubahan harga barang dan jasa. Dalam hal ini, peningkatan permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan demikian, mengingat perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan permintaan agregat, dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan harga.[40] Hal ini juga berarti bahwa kecenderungan kenaikan harga umum secara terus-menerus (*inflasi*) dapat terjadi apabila penambahan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Dapat dinyatakan secara sederhana bahwa: “jumlah uang beredar bertambah, harga barang-barang naik”. Dalam kasus ini, mengingat inflasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar maka inflasi dikenal sebagai *fenomena moneter*.

Dalam kasus lain, inflasi yang tinggi dapat berlangsung dalam waktu yang lama walaupun perkembangan jumlah uang beredar relatif rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *Strukturalis* yang menyatakan

---

[40] Salah satu implikasi Teori Kuantitas Klasik yang terpenting ialah bahwa dalam jangka pendek tingkat harga umum berubah secara proposional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh pemerintah.

bahwa inflasi dalam jangka panjang lebih disebabkan oleh adanya kekakuan (ketidakelastisan) struktur perekonomian di negara berkembang, terutama pada struktur penerimaan ekspor dan produksi bahan makanan dalam negeri. Dengan demikian, tekanan inflasi akan muncul apabila pertumbuhan sektor ekspor sangat lamban dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, atau pun produksi bahan makanan dalam negeri kurang memadai. Pendapat tersebut menempatkan inflasi sebagai *fenomena struktural*.

Bagaimana dengan inflasi di Indonesia, merupakan *fenomena moneter* atau *fenomena struktural*? Tidaklah mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Lebih mudah untuk bertanya: sejauh mana fenomena-fenomena tersebut terjadi di Indonesia? Walaupun sulit untuk memilah kedua fenomena tersebut, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diarahkan pada suatu kesimpulan dengan mencermati beberapa contoh sebagai berikut.

Pertama, situasi ekonomi pada paro pertama dekade 1960-an, tingkat inflasi (yang biasanya diukur dengan menggunakan perubahan harga barang konsumsi) pada saat itu sangat tinggi, bahkan mencapai 600%. Mengapa harga barang-barang dapat melonjak demikian tinggi? Hal ini disebabkan oleh kebijakan pencetakan uang yang berlebihan pada masa itu. Dengan kondisi ekonomi-politik saat itu, ditambah dengan kurang matangnya manajemen pengendalian uang beredar, pencetakan uang merupakan kebijakan yang lumrah dilakukan oleh pemerintah. Berlebihnya penyediaan uang dalam perekonomian berdampak pada kenaikan harga-harga secara tajam.

Kedua, krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998 lalu. Pada waktu itu terjadi kelangkaan dana di perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin melemah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah (Bank Indonesia) menyuntik dana ke pasar dalam jumlah yang sangat besar dalam beberapa waktu, yang selanjutnya berakibat pada melonjaknya inflasi beberapa saat kemudian. Begitu pula selanjutnya, begitu pertumbuhan uang beredar mereda, inflasi juga kembali melemah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.

Rata-rata Pertumbuhan Uang Beredar dan Inflasi (Tahunan)

Periode	Pertumbuhan M1	Pertumbuhan M2	Inflasi
1997.3 – 1997.4	16 %	23 %	8 %
1998.1 – 1998.4	49 %	63 %	58 %
1999.1 – 1999.2	5 %	29 %	44 %
1999.3 – 2001.4	19 %	13 %	7 %

Keterangan : Inflasi dihitung dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Ketiga, pelonjakan harga-harga barang secara langsung sesaat setelah Pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan, misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik, atau tarif angkutan. Kebijakan lain berupa kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Upah Minimum Regional (UMR) juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga barang-barang di masyarakat. Belum lagi kenaikan harga makanan sebagai akibat banjir yang melanda daerah tertentu, yang mengakibatkan tersendatnya penyediaan bahan makanan ke daerah lain. Salah satu atau beberapa kebijakan di atas hampir pasti berlangsung setiap tahun.

Dari gambaran di atas, berdasarkan contoh pertama dan kedua, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia merupakan *fenomena moneter*. Namun, apabila dicermati contoh ketiga dengan berbagai kejadiannya, secara tidak langsung mungkin disepakati bahwa inflasi di Indonesia merupakan *fenomena struktural*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kedua fenomena tersebut terjadi untuk kasus perekonomian Indonesia.

Pengendalian Jumlah Uang Beredar

Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang beredar pada umumnya ditujukan untuk

menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan pengendalian di sini adalah upaya otoritas moneter baik untuk menambah jumlah uang yang beredar (kebijakan ekspansi moneter) maupun mengurangi jumlah uang yang beredar (kebijakan kontraksi moneter). Pengendalian jumlah uang beredar tersebut juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara uang dengan variabel-variable ekonomi lainnya, seperti suku bunga, *output*, dan harga. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, otoritas moneter akan dapat mempengaruhi nilai uang sedemikian rupa sehingga perkembangannya akan mampu mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan sesuai dengan sasaran akhir yang ditetapkan, seperti inflasi yang rendah dan/ atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bagaimana dengan pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia? Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan otoritas moneter yang mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, antara lain dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Dalam pada itu, pengendalian jumlah uang beredar dianggap cukup relevan, khususnya apabila dikaitkan dengan arah baru penerapan kebijakan moneter di Indonesia yang menekankan pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu kestabilan nilai rupiah (harga).

Sesuai dengan salah satu aspek dalam paradigma kebijakan moneter yang dianut saat ini, yaitu pencapaian *target kuantitas*, melalui pengendalian jumlah uang beredar kebijakan moneter oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu tercapainya kestabilan harga.[41] Dalam pelaksanaannya, pengendalian tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung mengingat perkembangan uang beredar sangat terkait dengan perilaku pelaku ekonomi lainnya, yaitu perbankan dan masyarakat. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia ialah pengendalian jumlah uang primer. Pengendalian jumlah uang primer tersebut dilakukan dengan mengasumsikan bahwa perilaku angka pelipat ganda uang (*money*

[41] Sejalan dengan semakin berat dan kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam pengendalian moneter di Indonesia, kebijakan moneter juga menggunakan pencapaian *target harga* (suku bunga) sebagai salah satu aspek dalam paradigma kebijakan moneter.

multiplier) cukup stabil.[42] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan mengendalikan jumlah uang primer, Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar sehingga kegiatan ekonomi dapat diarahkan untuk mencapai perkembangan harga yang cukup stabil (inflasi yang rendah).

Namun, dalam praktiknya, pengendalian jumlah uang beredar yang optimal sangatlah sulit dilakukan. Paling tidak, terdapat tiga faktor yang menyebabkan sulitnya pengendalian jumlah uang beradar tersebut. *Faktor pertama* adalah adanya unsur-unsur yang bersifat kontradiktif pada pencapaian sasaran kebijakan. Misalnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan ekspansi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi yang sedang lesu. Tindakan ini biasanya mempunyai dampak pada meningkatnya inflasi. Sebaliknya, apabila diambil kebijakan kontraksi moneter untuk meredam laju inflasi tersebut, perkembangan kegiatan ekonomi diperkirakan akan terhambat. *Faktor kedua* adalah sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku permintaan uang masyarakat tergantung pada beberapa motif yang beragam. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan inovasi sektor keuangan dan keterbukaan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perilaku tersebut cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan. *Faktor ketiga* adalah sulitnya memprediksi perilaku angka pelipat ganda uang. Sebagaimana perkembangan permintaan uang, perilaku angka pelipat ganda uang juga cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar di masa mendatang diperkirakan akan semakin berat dan kompleks. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk menjajagi dan mengkaji beberapa kemungkinan penerapan kerangka kerja kebijakan moneter lain yang lebih optimal dalam rangka pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai rupiah.

---

[42] Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara konseptual hubungan antara uang primer dan uang beredar tercermin pada keberadaan angka pelipat ganda uang (*money multiplier*). Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai: Ms = mm x M0. Dalam hal ini, Ms adalah uang beredar, mm adalah angka pelipat ganda uang, dan M0 adalah uang primer.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. Kumpulan Materi Pengajaran Interen, beberapa edisi.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, beberapa tahun penerbitan.

Budiono. *Ekonomi Moneter*, edisi 3. Yogyakarta: BPFE, 1994.

Davies, Glyn. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*, 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, 2002.

Dowd, Kevin. “The Emergence of Fiat Money: a Reconsideration”, *Cato Journal*, Washington, Winter 2001.

____________, “Does Monetary Policy have a Future”, *Cato Journal*, Washington, Fall 2001.

Hubbard, R. Glenn. *Money, the Financial System, and the Economy*, 3rd ed. Addison-Wesley, 2002.

Jagdish Handa. *Monetary Economics*. London: ECAP 4EE, 2002.

Luckett, Dudley G. *Money and Banking*, 2nd ed. McGraw-Hill, 1980.

Menger, Karl. “The Origin of Money”, *The Economic Journal*, Vol. 2, June 1892.

McKinnon, Ronald I. “The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

Ritter, Joseph A. “The Transition from Barter to Fiat Money”, *American Economic Review*, Issue 1, March 1995.

Suseno. *Uang Beredar*, Materi Pengajaran Interen Bank Indonesia. Jakarta, 2002.

Temple, Robert. *The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention.* New York : Simon and Schuster, 1986.

Vickers, Douglas. *Money, Banking, and the Macroeconomy.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1985.

LAMPIRAN

Tabel 1.
Perkembangan Uang Beredar

(dalam triliun rupiah)

Tahun	C	D	M1	T	M2	M0
1970	0.15	0.09	0.24	0.08	0.32	0.19
1971	0.20	0.12	0.31	0.15	0.46	0.24
1972	0.27	0.21	0.47	0.22	0.70	0.38
1973	0.38	0.30	0.67	0.32	0.99	0.53
1974	0.50	0.45	0.94	0.51	1.45	0.82
1975	0.65	0.62	1.27	0.75	2.02	1.10
1976	0.78	0.82	1.60	1.05	2.65	1.34
1977	0.98	1.03	2.01	1.13	3.13	1.67
1978	1.24	1.25	2.49	1.33	3.82	1.83
1979	1.55	1.77	3.32	1.84	5.16	2.40
1980	2.17	2.84	5.01	2.70	7.71	3.27
1981	2.55	3.93	6.47	3.23	9.71	3.80
1982	2.93	4.19	7.12	3.95	11.07	3.98
1983	3.33	4.24	7.57	7.09	14.66	4.89
1984	3.71	4.87	8.58	9.36	17.94	5.47
1985	4.44	5.66	10.10	13.05	23.15	6.44
1986	5.34	6.34	11.68	15.98	27.66	7.81
1987	5.78	6.90	12.69	21.20	33.89	8.67
1988	6.25	8.15	14.39	27.61	42.00	8.18
1989	7.43	12.69	20.11	38.59	58.70	10.32
1990	9.09	14.73	23.82	60.81	84.63	12.01
1991	9.35	17.00	26.34	72.72	99.06	12.36
1992	11.48	17.30	28.78	90.27	119.05	14.74
1993	14.43	22.37	36.81	108.40	145.20	17.61
1994	18.63	26.74	45.37	129.14	174.51	22.16
1995	20.81	32.41	53.22	169.42	222.64	25.85
1996	21.87	42.22	64.09	224.54	288.63	34.41
1997	28.42	49.92	78.34	277.30	355.64	46.69
1998	41.39	59.57	100.96	476.18	577.15	75.12
1999	58.35	66.28	124.63	521.57	646.21	101.79
2000	72.37	89.81	162.19	584.84	747.03	125.62
2001	76.34	101.39	177.73	666.32	844.05	127.80

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2.
Perkembangan Angka Pelipatganda Uang

Tahun	mm1	mm2	c	t	r
1970	1.26	1.67	1.74	0.91	0.23
1971	1.29	1.89	1.65	1.23	0.18
1972	1.26	1.85	1.31	1.08	0.25
1973	1.28	1.89	1.27	1.09	0.24
1974	1.14	1.77	1.12	1.15	0.34
1975	1.16	1.84	1.04	1.20	0.33
1976	1.20	1.98	0.95	1.28	0.30
1977	1.20	1.88	0.95	1.10	0.32
1978	1.36	2.09	0.99	1.07	0.23
1979	1.38	2.15	0.87	1.04	0.24
1980	1.53	2.36	0.76	0.95	0.20
1981	1.70	2.56	0.65	0.82	0.17
1982	1.79	2.78	0.70	0.94	0.13
1983	1.55	3.00	0.79	1.67	0.14
1984	1.57	3.28	0.76	1.92	0.12
1985	1.57	3.60	0.78	2.30	0.11
1986	1.50	3.54	0.84	2.52	0.11
1987	1.46	3.91	0.84	3.07	0.10
1988	1.76	5.14	0.77	3.39	0.05
1989	1.95	5.69	0.59	3.04	0.06
1990	1.98	7.05	0.62	4.13	0.04
1991	2.13	8.02	0.55	4.28	0.03
1992	1.95	8.08	0.66	5.22	0.03
1993	2.09	8.25	0.64	4.84	0.02
1994	2.05	7.88	0.70	4.83	0.02
1995	2.06	8.61	0.64	5.23	0.02
1996	1.86	8.39	0.52	5.32	0.05
1997	1.68	7.62	0.57	5.55	0.06
1998	1.34	7.68	0.69	7.99	0.06
1999	1.22	6.35	0.88	7.87	0.07
2000	1.29	5.95	0.81	6.51	0.08
2001	1.39	6.60	0.75	6.57	0.07

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3.
Perkembangan Tingkat Penggunaan dan Perputaran Uang

Tahun	*Tingkat Penggunaan Uang*		*Tingkat Perputaran Uang*	
	M1/PDB	**M2/PDB**	**PDB/M1**	**PDB/M2**
1970	0.07	0.09	14.15	10.62
1971	0.08	0.12	12.36	8.44
1972	0.10	0.14	10.14	6.91
1973	0.09	0.14	10.60	7.16
1974	0.08	0.13	11.97	7.76
1975	0.10	0.15	10.45	6.59
1976	0.10	0.16	10.18	6.15
1977	0.10	0.16	9.98	6.39
1978	0.10	0.16	9.63	6.27
1979	0.10	0.15	10.17	6.54
1980	0.10	0.16	9.76	6.35
1981	0.11	0.16	9.35	6.24
1982	0.11	0.17	9.42	6.06
1983	0.10	0.19	10.26	5.29
1984	0.10	0.20	10.38	4.97
1985	0.10	0.24	9.74	4.25
1986	0.11	0.25	9.48	4.00
1987	0.10	0.26	10.14	3.80
1988	0.10	0.28	10.38	3.56
1989	0.11	0.33	8.93	3.06
1990	0.11	0.40	8.85	2.49
1991	0.11	0.40	9.49	2.52
1992	0.10	0.42	9.81	2.37
1993	0.11	0.44	8.96	2.27
1994	0.12	0.46	8.42	2.19
1995	0.12	0.49	8.50	2.03
1996	0.12	0.55	8.21	1.82
1997	0.12	0.57	8.01	1.76
1998	0.11	0.60	9.47	1.66
1999	0.11	0.59	8.82	1.70
2000	0.13	0.58	7.90	1.72
2001	0.12	0.57	8.39	1.77

Sumber : Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik